

## STRATEGI PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH

Rezki Akbar Norrahman

Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin

rezkiakbaar@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1, No: 1, Januari 2024 Halaman :7-12	<i>Education itself has the main goal of being a medium for developing potential and educating humans so they are ready to face life in the future. Education in a country can be said to be one of the most important things to pay attention to and improve. Education as a system is education itself consisting of elements or elements of education whose activities are functionally related to each other, so that an integrated, interconnected whole is created and it is hoped that it can achieve its goals. One important element of education is Education Policy. Educational policy is the entire process and result of formulating educational strategic steps which are outlined in the vision and mission of education, in order to realize the achievement of educational goals in a society for a certain period of time.</i>
<b>Keywords:</b> Education Policy School	

**Abstrak**

Pendidikan sendiri memiliki tujuan utama untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan dalam sebuah negara dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan pendidikan sendiri terdiri dari elemen- elemen atau unsur- unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga terjadinya satu kesatuan yang terpadu, saling berhubungan dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Salah satu unsur pendidikan yang penting adalah Kebijakan Pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

**Kata Kunci :** Pendidikan, Kebijakan, Sekolah

**PENDAHULUAN**

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional Indonesia telah menetapkan bahwa segala bentuk proses pendidikan yang ada dinegara Indonesia harus dilaksanakan dan dikembang secara maksimal agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Berdasarkan undang-undang tersebut tujuan pendidikan nasional yaitu menjadikan setiap warga negara memiliki wawasan keilmuan yang luas serta memiliki kepribadian yang luhur berlandaskan pancasila. Artinya bahwa tujuan pendidikan nasional di Indonesia menjadikan setiap warga negara menguasai aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilandasi oleh aspek sikap yang baik. Maka untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan pengelolaan dan pengawasan mutu yang maksimal.

Tujuan pendidikan di indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan Seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, mencerdasnya kehidupan bangsa, menjunjung tinggi martabat Indonesia dalam percaturan global baik politik, ekonomi, serta Iptek; dan Bukan hanya terlaksana tidaknya demokrasi sebagai suatu sarana untuk men-capai tujuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara kesejahteraan, pemerintah turut campur tangan dalam menetapkan kebijakan antara lain dalam menetapkan kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum merupakan pencerminan dari semua cita-cita dan pikiran dalam pendidikan. Kurikulum pendidikan

tinggi di Indonesia sering mengalami perubahan, bahkan setiap tahunnya, dengan cara peng-ajaran yang berbeda-beda.

Kebijakan pendidikan diperlukan agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan dibuat dengan mengacu pada kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam perguruan tinggi, Kebijakan pendidikan menjadi unsur penting. Terutama dalam menerapkan kurikulum yang berubah ubah seiring perkembangan zaman. Dengan adanya kebijakan pada Sekolah, maka pelaksanaan pendidikan yang ada dapat lebih terstruktur.

Pendidikan dalam lingkungan sekolah, biasa juga disebut dengan jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan ini memiliki jenjang yang terendah (sekolah Dasar) sampai yang tertinggi (Perguruan Tinggi) termasuk juga Madrasah dan Pesantren. Diselenggarakan sekolah disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan masyarakat yang pesat, sehingga menimbulkan differensiasi dan spesialisasi yang meluas. Kondisi masyarakat itu menuntut anak-anak untuk mempersiapkan diri secara baik, agar dapat memasuki kehidupan masyarakat dengan berbagai spesialisasi lapangan kerja yang memerlukan pengetahuan, keterampilan dan keahlian kerja dari yang paling sederhana sampai yang bersifat profesional.

## **METODE**

Karya tulis ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan (library research) dimana penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam proses pendidikan diberikanyan kesempatan dan wewenang kepada stakeholder pendidikan dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam memajukan embaga pendidikan Praktek kebijakan pendidikan dituangkan dalam sebuah pengelolaan yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (MBS). Pada sistem MBS ini terjadinya penyerahan wewenang pengelolaan sekolah kepada sekolah dan stakeholder yang terkait.

K.H.R. Zainuddin Fananie berpandangan bahwa pendidikan bertujuan untuk membantu menunjukkan jalan kebaikan kepada peserta didik atau siapa saja agar dapat memilih jalan tersebut dengan sendirinya. Tugas pendidik hanyalah menunjukkan jalan yang sebaik-baiknya agar eserta didik menjadi baik di setiap perbuatan, perkataan, dan hati.

H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa rumusan tujuan pendidikan nasional tentunya sifatnya abstrak sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan akal dan budi peserta didik. Bagi peserta didik pada tingkat-tingkat permulaan tentunya nilai-nilai Pancasila hanya dapat dihayati melalui contoh yang konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan perkembangan kemampuan akal dan budinya, nilai-nilai Pancasila beranjak menjadi nilai-nilai yang abstrak dan merupakan bagian dari perkembangan anak Indonesia

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli pendidikan di atas, tampak benang merah penghubung antar pendapat terkait tujuan pendidikan, yaitu pentingnya ada kebebasan atau kemerdekaan bagi peserta didik dalam proses belajarnya. Pendidikan bertujuan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan diri cecara merdeka tanpa paksaan atau intimidasi untuk menjadi apa yang diinginkan. Dalam hal tujuan pendidikan di Indonesia, karena dasar filsafat bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka tujuan pendidikan nasional di indonesia mengarah pada menginternalisasi nilai-nilai luhur pancasila dalam sikap dan perilaku kehidupan peserta didik.

Landasan kebijakan dalam pendidikan merupakan pedoman dan petunjuk bagi pelaksana pendidikan di dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Oleh sebab itu landasan tersebut biasanya

mempunyai keterkaitan yang erat dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku pada suatu negara, kemudian ditetapkan dan dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dalam bidang tersebut pada saat itu. Kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan pasti mempunyai dasar yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kebutuhan masyarakat yang diimbangi dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Di dalam lingkungan ini, semua pihak yang terkait seperti peserta didik, guru, staff secara bersama-sama melaksanakan pendidikan dengan terencana. Ada beberapa karakteristik dalam lembaga pendidikan sekolah:

1. Dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis;
2. Pada tiap jenjang, usia peserta didik relatif homogen;
3. Jangka waktu pendidikan di tiap jenjang tersebut tidak sama, tergantung pada program yang ditempuh;
4. Materi yang diajarkan di sekolah lebih umum dan sifatnya akademis;
5. Untuk selesai dalam satu jenjang, peserta didik harus menjalani serangkaian ujian yang ditetapkan secara resmi oleh sekolah berdasarkan aturan pemerintah.

Berikut adalah gambaran Kebijakan Pendidikan di Sekolah.

1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah (TK – SD – SMP – SMA, informal) Kebijakan pertama pada sistem pendidikan Merdeka Belajar yaitu menerapkan kolaborasi dan pembinaan antarsekolah. Sebelumnya, pemangku kepentingan bekerja dengan sistem mereka sendiri atau sistem yang tertutup. Sekolah-sekolah juga terlalu fokus kepada administrasi dan peraturan yang terlalu membebani. Penerapan kolaborasi dan pembinaan antarsekolah menjangkau berbagai tingkatan sekolah yaitu TK, SD, SMP, SMA, hingga sekolah informal. Ada 4 poin yang coba untuk diwujudkan dalam kebijakan ini, yaitu adanya sekolah penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelolaan administrasi bersama, dan pendidikan informal yang berbasis nilai. Penerapan 4 poin ini akan mengubah sistem yang sebelumnya tertutup menjadi sistem terbuka dengan adanya kerjasama antar pemangku kepentingan

2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah Menurut Pak Nadiem, sekolah-sekolah terlalu memfokuskan diri pada urusan administrasi pada sistem pendidikan sebelumnya. Program-program untuk pengembangan instrumen sekolah seperti guru dan kepala sekolah pun kurang diperhatikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan baru yang diusung Pak Nadiem ini salah satunya adalah meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah diwujudkan dengan memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas / platform pembelajaran.

3. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi Kebijakan pendidikan baru yang ke – 3 yaitu membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Platform yang dibangun terdiri dari 5 kriteria: berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif. ketika platform tersebut sudah mulai digunakan, sekolah juga akan didukung dengan sarana dan prasarana teknologi. Rencana dukungan tersebut mengenai tiga hal seperti biaya paket internet (data cost), ketersediaan perangkat belajar (equipment availability), dan konektivitas internet dan listrik untuk daerah 3T (connectivity & electricity)

#### 4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilai

Perbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan sistem penilaian menjadi fokus pada kebijakan pendidikan yang baru dari Pak Nadiem. Hal ini bertujuan untuk menanamkan kompetensi yang tepat dalam diri generasi masa depan. Perbaikan-perbaikan yang dimaksud terdiri dari penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi dan numerasi, pengembangan karakter, berbasis kompetensi, serta fleksibel.

#### 5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata

Kebijakan pendidikan baru yang ke – 4 yaitu meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pendistribusian yang merata. Nantinya pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsultatif serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi. Pengawasan terkait anggaran, infrastruktur, penerimaan siswa (zonasi), dan guru, akan diawasi demi pendistribusian yang merata di setiap daerah.

#### 6. Membangun sekolah / lingkungan belajar masa depan

Kemendikbud juga merencanakan untuk dimulainya pembangunan sekolah atau lingkungan belajar untuk masa depan. Pembangunan ini mencakup 5 aspek yaitu aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman. Aman dan inklusif meliputi fasilitas darurat / tanggap bencana, bebas kerusakan, ramah disabilitas, dan bebas dari perundungan / diskriminasi.

Pemanfaatan teknologi meliputi kelas digital dengan akses internet, komputer untuk setiap anak, serta akses pembelajaran daring. Kolaboratif berarti kemudahan mengatur ruang kelas menjadi kelompok – kelompok untuk membangun kerja tim, empati, dan kepemimpinan. Aspek kreatif memungkinkan pengaturan ruang kelas sesuai kebutuhan / preferensi siswa atau guru untuk mengasah kreativitas. Sistem pembelajaran berbasis pengalaman dilakukan melalui eksplorasi, interaksi dengan lingkungan dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dunia nyata

#### 7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan

Pemberian insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan juga menjadi salah satu kebijakan pendidikan baru. Pemberian insentif meliputi dana CSR, insentif pajak, emitera swasta publik, otonomi, dan keuntungan yang lebih besar lainnya berupa insentif keuangan dan penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan regulasi dilakukan karena persyaratan nirlaba dan kepemilikan tanpa aset untuk yayasan dan proses perizinan yang kompleks, selama ini menjadi penghalang signifikan bagi sektor swasta atau mitra global untuk berpartisipasi dalam sistem pendidikan Indonesia.

#### 8. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi

Kebijakan pendidikan baru yang ke – 8 yaitu mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Pihak industri atau asosiasi akan terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran, dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CSR. Pada pendidikan vokasi, pemerintah pusat akan membentuk program magang dan penempatan langsung dengan pemain industri. Pelatihan guru dan mempekerjakan praktisi industri juga menjadi rencana pada kebijakan ini. Pemerintah akan mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan untuk menarik keterlibatan industri dan memungkinkan otonomi /fleksibilitas yang lebih besar.

#### 9. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia

Kebijakan pendidikan baru yang ke - 9 yaitu membentuk pendidikan tinggi kelas dunia dengan diferensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat - pusat unggulan serta mempererat hubungan dengan industri dan kemitraan global. Ada tiga target diferensiasi misi perguruan tinggi:

- 1) Membangun PT bereputasi dunia di setiap bidang sebagai pusat inovasi untuk daya saing bangsa
- 2) Membangun 1 PT unggul di setiap provinsi sebagai motor pembangunan daerah & nasional
- 3) Perluasan akses PT dan membentuk ekosistem life-long learning

#### 10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih

Selama ini, mekanisme akreditasi terbilang rumit karena kewajibannya untuk memperbaharui akreditasi setiap 4 tahun dan berfokus pada aspek administratif. Pada kebijakan pendidikan yang baru ini, mekanisme akreditasi akan bersifat otomatis dan berbasis data dengan mengkombinasikan standar pemerintah dan komunitas sehingga berfokus pada hasil.

Peningkatan kredibilitas dan mekanisme akreditasi memungkinkan otonomi dalam institusi pendidikan yang terdiri dari 4 aspek yaitu kurikulum / program, guru / dosen, kemitraan, dan pengoperasian / manajemen. Otonomi ini dapat diterapkan pada pendidikan tinggi dan/atau sekolah swasta. Kebijakan yang ke - 10 ini bersifat suka rela, berbasis data, merujuk pada praktik terbaik tingkat global, serta pelibatan industri atau komunitas.

### **KESIMPULAN**

Kebijakan dalam pembangunan nasional terhadap bidang pendidikan merupakan sebuah bagian dari kebijakan publik, banyak kebijakan baru yang dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satu yang menjadi fokus pemerintah adalah pendidikan ini perguruan tinggi. Pada tahun 2020 ini menteri pendidikan nadiem Makarim membuat suatu gebrakan baru yaitu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan adanya pendidikan manusia juga dapat mencapai kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Dalam hal ini pemerintah juga tidak bermain-main dalam mengalahkan pendidikan.

### **REFERENCES**

- Alfalachu Indiantoro, Wafda Vivid (2017) Perubahan Sistem Kebijakan Pendidikan Tinggi Dalam Dimensi Pendidikan Hukum. *Justitia Jurnal Hukum* Vol 1 No.2
- Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta).
- Agus Wibowo (2013). *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Forum Mangunwijaya, (2007), *Kurikulum yang Mencerdaskan, Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif*, Cetakan Pertama, Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Hasbulloh. (2012), *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers)
- Hobson, P. et al. (2015) *Ide-Ide Brilian 50 Pakar Pendidikan Kontemporer Paling Berpengaruh di Dunia Pendidikan Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ismail, F. (2018). *Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kcalitas Pendidikan*. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 2(2).

- Nata, Abuddin, 1997. Filsafat Pendidikan Islam I (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu)
- Rozak Abdul, 2021, Kebijakan Pendidikan di Indonesia, jurnal of islamic education, vol 3.
- Suharto, T. (2005) "Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat," Cakrawala Pendidikan, 14, pp. 323–346
- Suryadi., Ace., Budimansyah dan Dasim. (2009) "Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional: Konsep, Teori dan Aplikasi dalam Analisis Kebijakan Publik", Bandung: Widya Aksara Press.
- Tenlain, W. et. al. (1992) Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tilaar, H. A. R. (2015) Pedagogik Teoritis untuk Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.